

Analisis Permasalahan dan Kebutuhan Penguatan Kompetensi Guru Bimbingan Konseling Di Kota Makassar

Abdullah Pandang¹, Muhammad Anas¹

Departemen Bimbingan Konseling, FIP Universitas Negeri Makassar¹

Email: pandang_unm@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan berikut: (1) Untuk mengenali aspek kompetensi yang perlu ditekankan dalam program penguatan kompetensi konselor sekolah, (2) Untuk menggambarkan masalah yang dialami oleh konselor sekolah dalam pengembangan kompetensi, dan (3) untuk mengenali bentuk pengembangan kapasitas yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan keadaan konselor yang bersifat sementara di Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah konselor sekolah yang bekerja di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah kejuruan di kota Makassar berjumlah 256. Sampel diambil sebanyak 25% dari populasi, yaitu 69 orang dan dipilih dengan teknik proportional random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan FGD. Analisis data meliputi analisis kuantitatif dengan statistik deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingginya indeks kebutuhan konselor sekolah di Kota Makassar untuk mendapatkan penguatan pada semua titik kompetensi yang tercakup dalam sepuluh kompetensi inti konselor, (2) masalah yang dialami oleh konselor sekolah di Makassar. Kota dalam mengikuti penguatan kegiatan kompetensi, peluang yang tersedia bagi konselor sekolah untuk mengikuti penguatan kompetensi, kurangnya dukungan finansial, kesulitan meninggalkan tugas karena keterbatasan konselor sekolah, (3) dalam rangka memperkuat kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keadaan konselor sekolah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk: (a) waktu pelaksanaannya harus dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu beban kerja di sekolah; (b) menggunakan model pelatihan berbasis sekolah; dan (c) penggunaan kombinasi narasumber dari universitas dan fasilitator konselor sekolah yang terlatih.

Keywords: capacity building, counseling guidance competence, school counselor

PENDAHULUAN

Guru memegang peran penting terhadap kemajuan suatu bangsa. Dalam hubungan ini, salah satu dari tujuh *targets and imperatives for education after 2015*, dari Unesco, yaitu target 6 menegaskan: "By 2030, all governments ensure that all learners are taught by qualified, professionally trained, motivated and well-supported teachers" (Unesco, 2014).

Profesi guru termasuk guru bimbingan konseling di Indonesia mendapatkan momentum sejak diterbitkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru ditetapkan dan diakui secara formal sebagai profesi dalam undang-undang tersebut. Sebagai bagian dari pendidik di sekolah, guru bimbingan konseling atau konselor dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai standar profesi bidang konseling.

Dalam rangka pengembangan kualitas guru di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan dan menggunakan program yang disebut Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau *continuous professional development* (CPD). Program PKB dilakukan secara terintegrasi dengan hasil penilaian kinerja guru dan sekaligus pembinaan karier guru secara berkelanjutan. Pembinaan karier berkelanjutan (*continuous carrier development*) adalah upaya

peningkatan yang meliputi aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan pekerjaan, jabatan, dan kehidupannya secara terprogram, terpadu, dan terus menerus (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

Tuntutan dan arah standarisasi profesi bimbingan konseling di Indonesia mengacu kepada perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bimbingan konseling. Standar kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh tenaga konselor/guru bimbingan konseling (BK). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, standar kompetensi konselor/guru BK distruktur dan dikelompokkan ke dalam empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Cakupan dan butir-butir kompetensi ini kemudian ditetapkan berdasarkan, dengan komposisi, sebagai berikut: (1) Kompetensi Pedagogi, dengan tiga kompetensi inti, meliputi: (a) menguasai teori dan praksis pendidikan, (b) mengaplikasikan perkembangan fisiologis, psikologis, dan perilaku konseli, dan (c) menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Kompetensi Kepribadian, mencakup empat kompetensi inti, yaitu: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, (c) menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan (d) menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Kompetensi Sosial, mencakup tiga kompetensi inti, yaitu: (a) mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, (b) berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, (c) mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi. Kompetensi Profesional mencakup tujuh kompetensi inti, yaitu: (a) menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, (b) menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, (c) merancang program bimbingan dan konseling, (d) mengimplementasikan program BK yang komprehensif, (e) menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, (f) memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan (g) menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut: (1) Mengenali aspek kompetensi yang perlu mendapat penekanan dalam program penguat akan kompetensi guru bimbingan konseling di Kota Makassar, (2) Menggambarkan permasalahan yang dialami guru bimbingan konseling di Kota Makassar dalam pengembangan kompetensi selama ini, dan (3) Mengenali bentuk penguatan kapasitas yang dinilai tepat sesuai kebutuhan dan keadaan guru bimbingan konseling di Kota Makassar.

Konselor sekolah memiliki kebutuhan pelatihan unik yang berbeda dari konselor kesehatan mental klini (Kozlowski dan Huss, 2013). Mereka harus disiapkan untuk menjalankan fungsi dalam berbagai peranan untuk membimbing semua siswa pada aspek perkembangan akademik, karir, dan sosial/pribadi (Studer & Oberman, 2006). Karena itu, konselor atau guru bimbingan konseling, sebagai pendidik profesional, dituntut menguasai kompetensi sesuai standar kompetensi profesi konselor Indonesia. lam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, ada empat bidang kompetensi yang perlu dikuasai oleh konselor sekolah di Indonesia, yaitu, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi pribadi, dan kompetensi social.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terhadap hasil uji kompetensi guru 2015 (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2016), menunjukkan gambaran bahwa nilai rata-rata nasional adalah 56,69. Hasil sedikit di atas standar kompetensi minimal (SKM) yang ditargetkan, pada tahun 2015 yaitu 55,00, namun masih jauh dari target Renstra Sirektorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang diharapkan divapai pada akhir tahun 2019, yaitu 80.

Penelitian yang terkait dengan kompetensi guru BK dilaporkan oleh banyak peneliti. Penelitian Lestari dkk.(2013), menunjukkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling (BK) dalam pelaksanaan pelayanan BK di SMP Negeri di Cilacap tergolong tinggi. Penelitian Jumail (2013) menunjukkan hasil secara keseluruhan kompetensi profesional guru BK di Kota Padang mencapai kriteria sangat tinggi. Penelitian Malik dan Kurniawan (2015) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konselor di SMA Negeri Kabupaten Pemalang tahun 2014/2015 terhadap kompetensi profesional dalam pelayanan bimbingan konseling berada dalam kategori tinggi (71%).

Dalam hal pemanfaatan teknologi oleh konselor dalam pelayanan bimbingan konseling, Creamer (2001) menemukan, konselor sekolah menggunakan teknologi untuk berbagai tugas mulai dari tugas

penyelesaian tugas tulis-menulis hingga layanan kepada siswa yang bersifat interkatif. Konselor juga tertarik untuk mengikuti pengembangan kompetensi di bidang teknologi yang terkait dengan pelayanan bimbingan konseling.

Penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kompetensi guru dan konselor sekolah juga telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Beberapa faktor yang dinilai berpengaruh signifikan, antara lain: faktor gender dan usia (Anbuthasan dan Balakrishnan, 2013), faktor pengalaman kerja (Yon, 1991; Ismanto, 2007; Moyer dan Yu, 2010), faktor latar belakang pendidikan (Ismanto, 2007; Mustaqim, 2013); Syaikhul Alim, 2010; Ivanova dan Skara-Mincane, 2016), faktor sertifikasi (Darling-Hammond, dkk, 2005; Bond, 1998; dan Chang, dkk. 2014), serta faktor kepemimpinan kepala sekolah, sikap guru terhadap profesinya, dan motivasi kerja guru (Saripuddin, 2014).

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dikombinasi dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian adalah guru bimbingan konseling yang bekerja pada jenjang sekolah SMP, SMA, dan SMK di Kota Makassar berjumlah 256. Sampel diambil sebesar 25% dari populasi, yaitu 69 orang dan dipilih dengan teknik *proporsional random sampling* hingga diperoleh sampel guru BK SMP/MTs sebanyak 30 orang, SMA/MA sebanyak 23 orang, dan SMK sebanyak 12 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik angket, wawancara dan FGD. Analisis data mencakup analisis kuantitatif dengan statistik deskriptif dan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini meliputi dua hal yakni, gambaran kebutuhan terhadap penguatan kompetensi, dan gambaran permasalahan dalam mengikuti penguatan kompetensi. Berikut kajian dari kedua hal tersebut.

Gambaran Kebutuhan Terhadap Penguatan Kompetensi

Hasil analisis terhadap inventori kebutuhan menunjukkan gambaran hasil sebagai berikut:

a. Kompetensi inti 1: Menguasai teori dan praksis pendidikan

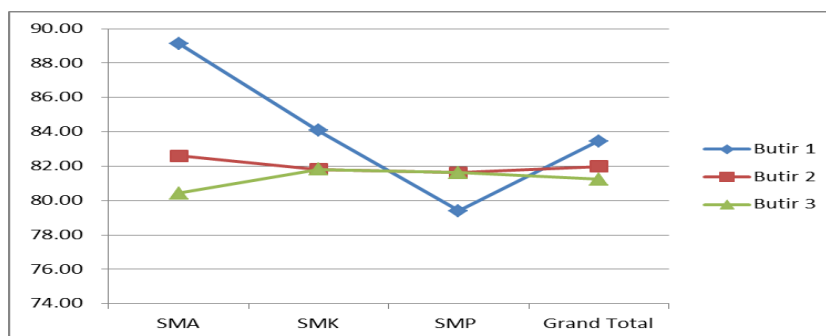
Pada aspek kompetensi inti 1, hasil analisis menunjukkan indeks kebutuhan guru BK pada ketiga jenjang pendidikan tergolong sangat tinggi. Semua item kompetensi yang diajukan dalam kompetensi inti 1 ini semuanya menunjukkan indeks kebutuhan di atas 80%. Item dengan indeks kebutuhan tertinggi adalah kompetensi “*Memanfaatkan piranti dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan BK*” dengan indeks kebutuhan 83,46 dari maksimal 100. Pada analisis perbandingan antar jenjang sekolah, tampak bahwa guru SMA pada butir ini, dengan indeks 89,13, disusul guru BK SMK dengan indeks 84,09, sementara guru BK SMP hanya menunjukkan indeks kebutuhan 79,41.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1 berikut ini.

Tabel 1
Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 1 (pada Rentang Skor 1-100)

Butir Kompetensi	SMA	SMK	SMP	Grand Total
1. Memanfaatkan piranti dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan BK	89.13	84.09	79.41	83.46
2. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dlm pelayanan BK	82.61	81.82	81.62	81.99
3. Mengaplikasikan landasan budaya dalam layanan BK	80.43	81.82	81.62	81.25

Sumber: Diolah dari Data Inventori Kebutuhan item 1 - 3



Gambar 1 Grafik Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 1

b. Kompetensi inti 2: Mengamplifikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli

Pada aspek kompetensi inti 2, indeks kebutuhan guru penguatan kompetensi juga tergolong sangat tinggi. Tiga item kompetensi yang ditanyakan semua memperoleh indeks kebutuhan di atas 81 atau kategori sangat tinggi. Item tertinggi adalah butir kompetensi butir 5 (*Menerapkan kaidah kepribadian konseli dalam pelayanan BK*) dengan indeks 83,46, menyusul butir 4 (*Mengamplifikasikan kaidah-kaidah perkembangan fisik dan psikologis individu dalam pelayanan BK*) dengan indeks 82,35, dan butir 6 (*Menerapkan kaidah kesehatan mental dalam pelayanan BK*) dengan indeks 81,99.

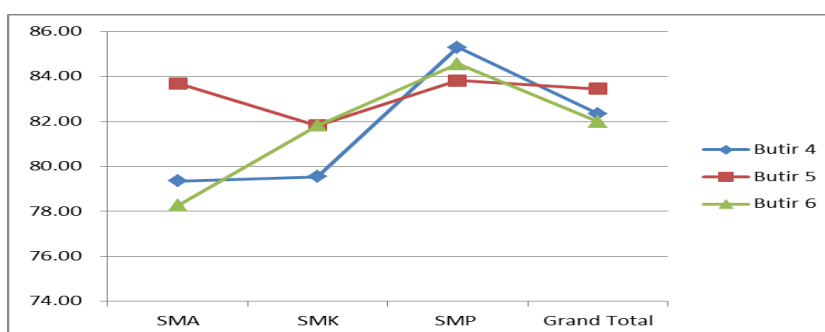
Dalam analisis perbandingan antar jenjang sekolah, tampak bahwa guru BK SMP menunjukkan kebutuhan dengan indeks lebih tinggi dibandingkan guru BK SMA dan SMK pada semua butir kompetensi. Indeks kebutuhan tertinggi guru BK SMA adalah butir kompetensi 5 menyusul butir kompetensi 4 dan 6. Sementara guru BK SMK menunjukkan indeks kebutuhan tertinggi pada butir 5 dan 6 lalu menyusul butir kompetensi 4.

Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2, sebagai berikut:

Tabel 2: Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 2 (pada Rentang Skor 1-100)

Butir Kompetensi	SMA	SMK	SMP	Grand Total
4. Mengamplifikasikan kaidah-kaidah perkembangan fisik dan psikologis individu dalam pelayanan BK	79.35	79.55	85.29	82.35
5. Menerapkan kaidah kepribadian konseli dalam pelayanan BK	83.70	81.82	83.82	83.46
6. Menerapkan kaidah kesehatan mental dalam pelayanan BK	78.26	81.82	84.56	81.99

Sumber: Diolah dari Data Inventori Kebutuhan item 4 - 5



Gambar 2 Grafik Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 2

c. Kompetensi inti 3: Menguasai esensi pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan

pendidikan

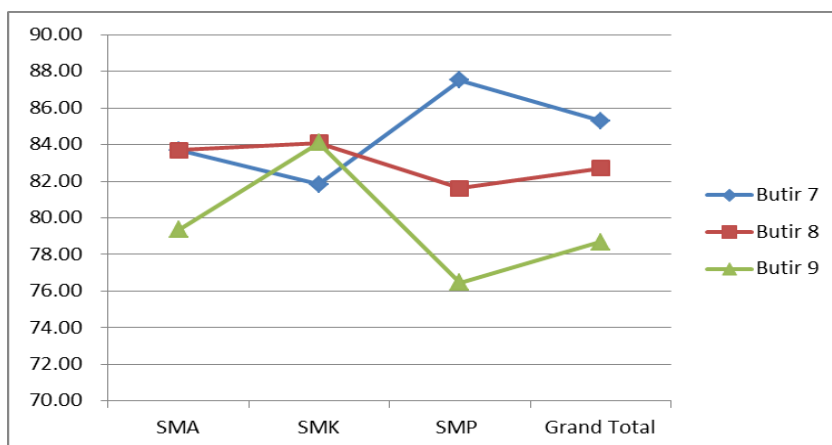
Hasil analisis pada aspek kompetensi inti 3, seperti terlihat pada Tabel 3 dan Gambar 3, menunjukkan indeks kebutuhan penguatan kompetensi yang sangat tinggi. Indeks kebutuhan tertinggi adalah butir kompetensi 7 (*Memahami praktik BK yang sesuai untuk berbagai kelompok usia*) dengan indeks 85,29., menyusul butir 8 (*Memahami esensi BK pada berbagai satuan jenis pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK)*) dengan idenks 82,72, dan paling rendah butir 9 (*memahami esensi layanan BK pada pendidikan non formal*) memperoleh indeks 78,68 atau masuk kategori tinggi.

Kebutuhan guru BK SMP untuk mendapatkan penguatan amat menonjol pada butir kompetensi 7 dengan indeks 87,50 disusul butir 8 dengan indeks 81,62, dan 9 dengan indeks 76,47. Guru BK SMA menunjukkan indeks kebutuhan paling menonjol pada butir 8 dan 9 (keduanya dengan indeks 84,09) sementara pada guru BK SMK, indeks kebutuhan paling menonjol adalah butir 7 dan 8 (keduanya dengan indeks 83,70).

Tabel 3: Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 3 (pada Rentang Skor 1-100)

Butir Kompetensi	SMA	SMK	SMP	Grand Total
7. Memahami praktik BK yang sesuai untuk berbagai kelompok usia	83.70	81.82	87.50	85.29
8. Memahami esensi BK pada berbagai satuan jenis pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK)	83.70	84.09	81.62	82.72
9. Memahami esensi layanan BK pada pendidikan non formal	79.35	84.09	76.47	78.68

Sumber: Diolah dari Data Inventori Kebutuhan item 7 - 9



Gambar 3 Grafik Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 3

- d. Kompetensi inti 4: Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli

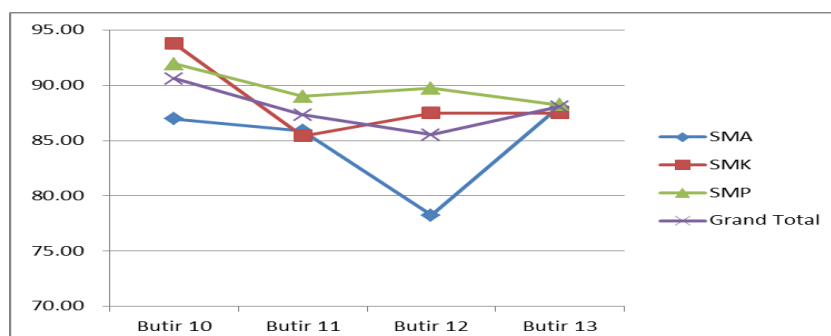
Pada aspek kompetensi inti 4, empat butir kompetensi yang ditanyakan semuanya memperoleh indeks kebutuhan yang sangat tinggi. Indeks kebutuhan tertinggi ditunjukkan pada butir 10 (*Menyusun instrumen pengumpulan data non-tes (angket, pedoman observasi, inventori, dll)*) dengan indeks 90,58, menyusul butir 13 (*Menganalisis, menafsirkan, dan membuat profil hasil dari instrumen pengumpulan data sehingga siap digunakan dalam pelayanan BK*) dengan indeks 88,04; lalu butir 11 (*Menggunakan beragai instrumen pengumpulan data dalam pelaksanaan asesmen karakteristik permasalahan dan kebutuhan siswa*) dengan indeks 87,32, dan terakhir butir 12 (*Menggunakan beragai instrumen pengumpulan data dalam pelaksanaan asesmen karakteristik lingkungan sekolah*) dengan indeks 85,51.

Pada butir 12 terdapat jarak kebutuhan yang cukup berbeda antara guru BK SMA (indek 78,26, tinggi) dibandingkan guru BK SMK (indek 87,50, sangat tinggi) dan guru BK SMP (89,71, sangat tinggi). Pada tiga butir kompetensi lainnya, guru BK dari ketiga jenjang sekolah cenderung menunjukkan level indek kebutuhan yang sama, yaitu pada ketegori sangat tinggi dengan indek di atas 85. Hasil analisis lengkap indek kebutuhan untuk kompetensi inti 4 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 4 sebagai berikut.

Tabel 4: Indeks Kebutuhan Penguatan Inti 4 (pada Rentang Skor 1-100)

Butir Kompetensi	SMA	SMK	SMP	Grand Total
10. Menyusun instrumen pengumpulan data non-tes (angket, pedoman observasi, inventori, dll)	86.96	93.75	91.91	90.58
11. Menggunakan berbagai instrumen pengumpulan data dalam pelaksanaan asesmen karakteristik permasalahan dan kebutuhan siswa	85.87	85.42	88.97	87.32
12. Menggunakan berbagai instrumen pengumpulan data dalam pelaksanaan asesmen karakteristik lingkungan sekolah	78.26	87.50	89.71	85.51
13. Menganalisis, menafsirkan, dan membuat profil hasil dari instrumen pengumpulan data sehingga siap digunakan dalam pelayanan BK.	88.04	87.50	88.24	88.04

Sumber: Diolah dari Data Inventori Kebutuhan item 10 - 13



Gambar 4 Grafik Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 4

e. Kompetensi inti 5: Menguasai kerangka teori dan praksis BK

Pada aspek kompetensi inti 4, lima butir kompetensi yang ditanyakan semuanya memperoleh indek kebutuhan yang sangat tinggi. Empat dari lima butir kompetensi mendapatkan indek di atas 86 dan hanya satu butir yang mendapatkan indek 81,16,

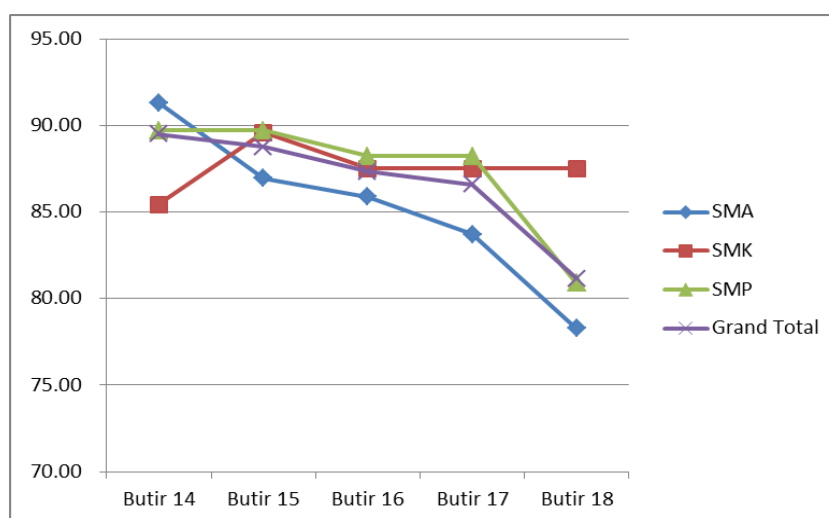
Indek tertinggi ditunjukkan pada butir kompetensi 14 (*Menerapkan pendekatan/ model BK sesuai permasalahan konseli*) dengan indek 89,49, menyusul butir 15 (*Melaksanakan prosedur layanan konseling individual secara tepat*) dengan indek 88,77, butir 16 (*Melaksanakan prosedur layanan BK kelompok secara tepat*) dengan indek 87,32, butir 17 (*Melaksanakan prosedur layanan BK klasikal secara tepat*) dengan indek 86,59, dan terakhir butir 18 (*Melaksanakan layanan BK yang memfasilitasi perkembangan akademik konseli*) dengan indek 81,16.

Tabel 5: Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 5 (pada Rentang Skor 1-100)

Butir Kompetensi	SMA	SMK	SMP	Grand Total
------------------	-----	-----	-----	-------------

14.	Menerapkan pendekatan/model BK sesuai permasalahan konseli	91.30	85.42	89.71	89.49
15.	Melaksanakan prosedur layanan konseling individual secara tepat	86.96	89.58	89.71	88.77
16.	Melaksanakan prosedur layanan BK kelompok secara tepat	85.87	87.50	88.24	87.32
17.	Melaksanakan prosedur layanan BK klasikal secara tepat	83.70	87.50	88.24	86.59
18.	Melaksanakan layanan BK yang memfasilitasi perkembangan akademik konseli	78.26	87.50	80.88	81.16

Sumber: Diolah dari Data Inventori Kebutuhan item 14 - 18



Gambar 5 Grafik Indek Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 5

f. Kompetensi inti 6: Merancang program bimbingan dan konseling

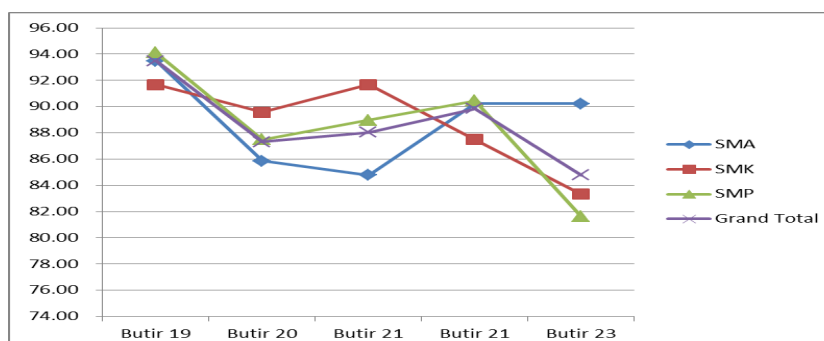
Tingkat kebutuhan guru BK untuk mendapatkan penguatan pada aspek kompetensi inti 6 juga sangat tinggi. Seperti terlihat pada Tabel 6 dan Gambar 6, indek kebutuhan pada lima butir yang ditanyakan semuanya mendapatkan di atas 87. Butir kompetensi 19 (*Menyusun program BK yang sesuai karakteristik kebutuhan siswa dan karakteristik lingkungan sekolah*) mendapatkan indek 93,48, disusul butir 22 (*Memilih dan menentukan strategi/metode/teknik BK yang tepat sesuai permasalahan dan kebutuhan siswa*) dengan indek 89,86, butir 21 (*Menyusun rencana pelaksanaan layanan BK (RPL, satlan, RPBK) yang sesuai tujuan dan topik yang direncanakan*) dengan indek 88,04, lalu butir 20 (*Menjabarkan program tahunan BK menjad rencana operasional bulanan dan/atau mingguan*) dengan indek 87,32, dan butir 23 (*Memilih dan mengembangkan media dan alat bantu yang diperlukan dalam layanan BK kelompok dan klasikal*) dengan indek 84,78.

Tabel 6: Indek Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 6 (pada Rentang Skor 1-100)

Butir Kompetensi	SMA	SMK	SMP	Grand Total
19. Menyusun program BK yang sesuai karakteristik kebutuhan siswa dan karakteristik lingkungan sekolah	93.48	91.67	94.12	93.48
20. Menjabarkan program tahunan/semester BK menjad rencana kegiatan operasional bulanan dan/atau mingguan	85.87	89.58	87.50	87.32
21. Menyusun rencana pelaksanaan layanan BK (RPL, satlan, RPBK) yang sesuai tujuan dan topik yang direncanakan.	84.78	91.67	88.97	88.04

22.	Memilih dan menentukan strategi/metode/teknik BK yang tepat sesuai permasalahan dan kebutuhan siswa	90.22	87.50	90.44	89.86
23.	Memilih dan/atau mengembangkan media dan alat bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan BK kelompok dan klasikal	90.22	83.33	81.62	84.78

Sumber: Diolah dari Data Inventori Kebutuhan item 19 - 23



Gambar 6 Grafik Indek Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 6

g. Kompetensi inti 7: Mengimplementasikan program BK yang komprehensif

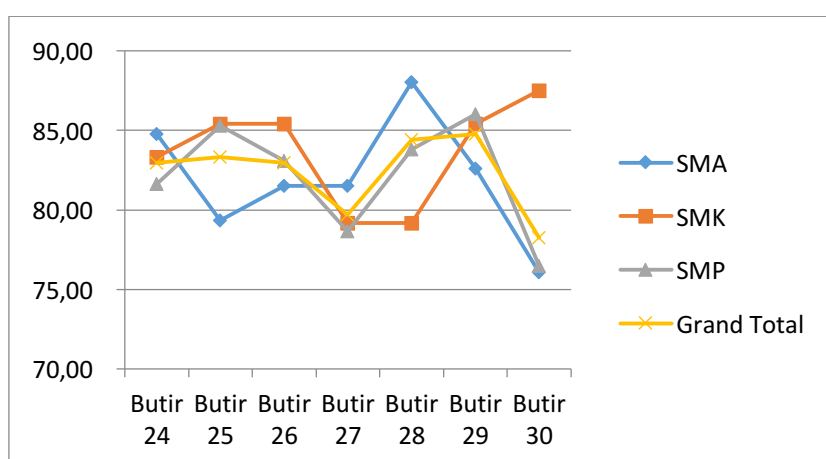
Kebutuhan penguatan kapasitas pada aspek kompetensi yang berkaitan dengan implementasi program BK juga menunjukkan indek yang sangat tinggi. Seperti terlihat pada Tabel 5.1.7, dari tujuh butir yang tercakup dalam aspek ini terdapat lima butir kompetensi yang mendapatkan indek di atas 81 atau kategori tinggi sekali, dan ada dua butir yang mendapatkan skor indek di bawah 80 atau kategori tinggi.

Tabel 7: Indek Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 7 (pada Rentang Skor 1-100)

Butir Kompetensi	SMA	SMK	SMP	Grand Total
24. Melaksanakan layanan BK yang memfasilitasi perkembangan karier konseli	84.78	83.33	81.62	82.97
25. Melaksanakan layanan BK yang memfasilitasi perkembangan personal (pribadi) konseli	79.35	85.42	85.29	83.33
26. Melaksanakan layanan BK yang memfasilitasi perkembangan sosial konseli	81.52	85.42	83.09	82.97
27. Merencanakan dan mengelola kebutuhan sarana-prasarana dalam penyelenggaraan program BK	81.52	79.17	78.68	79.71
28. Merencanakan dan mengelola kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan program BK	88.04	79.17	83.82	84.42
29. Melaksanakan pendekatan kolaboratif dan konsultasi dengan guru dan kepala sekolah dalam pelayanan BK	82.61	85.42	86.03	84.78
30. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri atau lembaga lain di luar sekolah dalam rangka pelayanan BK	76.09	87.50	76.47	78.26

Sumber: Diolah dari Data Inventori Kebutuhan item 24 - 30

Analisis perbandingan tingkat kebutuhan antar jenjang sekolah seperti terlihat pada Gambar 7, menunjukkan adanya kesearahan tingkat kebutuhan pada butir kompetensi 24, 26, 27, dan 29. Namun terdapat variasi yang cukup tinggi skor indek kebutuhan pada butir 25, 28, dan 30. Guru BK SMP menunjukkan kebutuhan tertinggi pada butir 29 dan terendah ada butir 30. Guru BK SMA menunjukkan kebutuhan tertinggi pada butir 28 dan terendah pada butir 30. Sementara guru BK SMK menunjukkan kebutuhan tertinggi pada butir 30 dan terendah pada butir 28.



Gambar 7 Grafik Indek Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 7

h. Kompetensi inti 8: Menilai proses dan hasil kegiatan BK

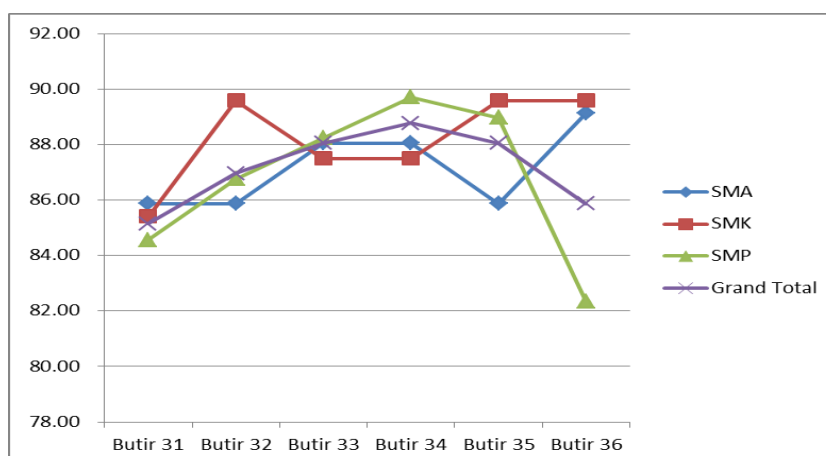
Pada aspek kompetensi inti yang berkaitan dengan kegiatan penilaian dan evaluasi program BK, indek kebutuhan guru BK untuk mendapatkan penguatan juga tergolong sangat tinggi. Seperti ditunjukkan pada Tabel 8, enam butir kompetensi pada aspek ini semuanya mendapatkan indek di atas 85. Ini menunjukkan perlunya penguatan guru BK pada semua butir kompetensi yang terkait kegiatan penilaian dan evaluasi layanan dan program BK.

Tabel 8: Indek Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 8 (pada Rentang Skor 1-100)

Butir Kompetensi	SMA	SMK	SMP	Grand Total
31. Menyusun instrumen penilaian keberhasilan layanan	85.87	85.42	84.56	85.14
32. Menyusun instrumen penilaian capaian program BK	85.87	89.58	86.76	86.96
33. Melakukan evaluasi hasil pelayanan BK dengan baik	88.04	87.50	88.24	88.04
34. Melakukan evaluasi proses pelayanan BK dengan baik	88.04	87.50	89.71	88.77
35. Melakukan evaluasi program BK dengan baik	85.87	89.58	88.97	88.04
36. Menggunakan hasil evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program BK	89.13	89.58	82.35	85.87

Sumber: Diolah dari Data Inventori Kebutuhan item 31 – 36

Dalam analisis perbandingan kebutuhan antar jenjang seperti terlihat pada Gambar 8, indek kebutuhan guru BK dari ketiga jenjang sekolah cenderung searah pada butir 31, 32, 33, 34, dan 35. Namun pada butir kompetensi 36 terdapat variasi kebutuhan di mana guru BK SMP menunjukkan ideks yang lebih rendah dibandingkan guru BK SMA dan SMK.



Gambar 8 Grafik Indek Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 8

i. Kompetensi inti 9: Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional

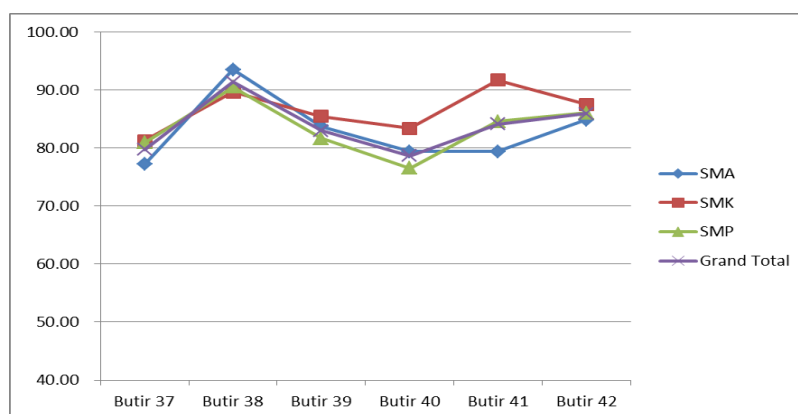
Pada aspek kompetensi inti 9, indik kebutuhan guru BK untuk mendapatkan penguatan juga tergolong sangat tinggi. Dari enam butir kompetensi yang ditanyakan, terdapat empat butir yang mendapatkan skor indik yang berada dalam kategori sangat tinggi, satu diantaranya mendapatkan skor indik 91,30. Dua lainnya, yaitu butir 37 dan 40 hanya masuk kategori tinggi. Ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas guru BK dalam butir-butir kompetensi yang berkaitan dengan aspek kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Dalam analisis perbandingan indik kebutuhan antar guru BK dari tiga jenjang sekolah, seperti ditunjukkan pada Gambar 9, tampak adanya keseragaman indik kebutuhan guru BK dari ketiga jenjang sekolah pada semua butir kompetensi.

Tabel 9: Indik Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 9 (pada Rentang Skor 1-100)

Butir Kompetensi	SMA	SMK	SMP	Grand Total
37. Melaksanakan layanan referal kepada sumber bantuan yang tepat	77.17	81.25	80.88	79.71
38. Menyelenggarakan pelayanan BK sesuai dengan kode etik BK	93.48	89.58	90.44	91.30
39. Mempertahankan objektivitas dalam melihat masalah konseli	83.70	85.42	81.62	82.97
40. Menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli yang sedang dilayani	79.35	83.33	76.47	78.62
41. Mengelola emosi dan keterbatasan pribadi saat melaksanakan tugas	79.35	91.67	84.56	84.06
42. Menjaga kerahasiaan konseli saat berkomunikasi dengan pihak lain (guru, kepala sekolah, orangtua, pengawas).	84.78	87.50	86.03	85.87

Sumber: Diolah dari Data Inventori Kebutuhan item 37 - 42



Gambar 9 Grafik Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 9

j. Kompetensi inti 10: Mengusasi konsep dan praksis penelitian dalam BK

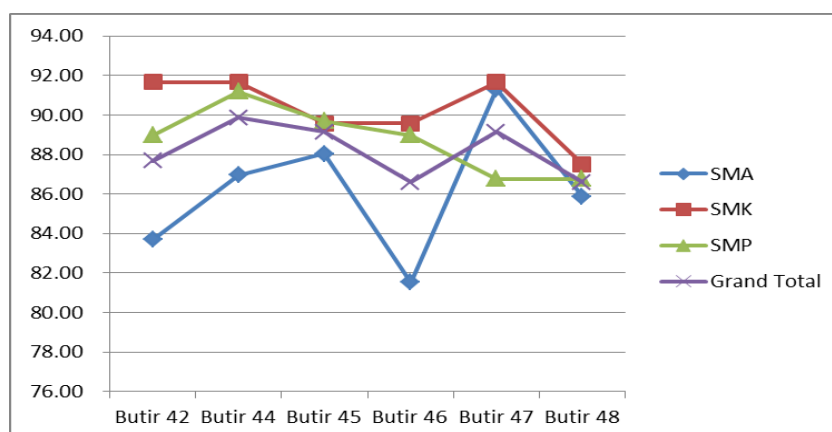
Pada aspek kompetensi inti yang berkaitan dengan penguasaan konsep dan praksis penelitian, indeks kebutuhan guru BK untuk mendapatkan penguatan juga tergolong sangat tinggi. Enam butir kompetensi yang ercaup dalam aspek ini semuanya mendapatkan indeks di atas 86.

Tabel 10 : Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 10 (Rentang Skor 1-100)

Butir Kompetensi	SMA	SMK	SMP	Grand Total
43. Merancang dan membuat proposal penelitian BK	83.70	91.67	88.97	87.68
44. Melaksanakan penelitian tindakan BK (PTBK)	86.96	91.67	91.18	89.86
45. Melaksanakan penelitian studi kasus dalam BK	88.04	89.58	89.71	89.13
46. Melaksanakan penelitian metode eksperimen dalam BK	81.52	89.58	88.97	86.59
47. Menyusun laporan penelitian BK	91.30	91.67	86.76	89.13
48. Menyusun artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal	85.87	87.50	86.76	86.59

Sumber: Diolah dari Data Inventori Kebutuhan item 43 - 48

Dalam analisis perbandingan indeks kebutuhan antar jenjang sekolah seperti ditunjukkan pada Gambar 10, tampak adanya kesearahan kebutuhan penguatan antar guru BK dari ketiga jenjang. Hanya pada butir 46 yang sedikit ada variasi, dimana guru BK SMA menunjukkan indeks kebutuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan guru BK SMP dan SMA.



Gambar 10 Grafik Indeks Kebutuhan Penguatan Kompetensi Inti 10

Gambaran Permasalahan dalam Mengikuti Penguatan Kompetensi

Dari pelaksanaan wawancara dan *focus group discussion* (FGD) yang telah dilakukan diperoleh beberapa informasi terkait permasalahan yang dialami oleh guru BK dalam rangka penguatan kapasitas:

- a. Sedikit dan belum meratanya kesempatan bagi para guru BK untuk mendapatkan penguatan kapasitas. Beberapa guru BK mengaku telah sering mengikuti berbagai bentuk penguatan kapasitas sementara yang lainnya merasa sangat jarang mendapatkan kesempatan.
- b. Kesulitan dalam pembiayaan. Beberapa penguatan kapasitas, khususnya yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau organisasi profesi mewajibkan peserta untuk menanggung sendiri pembiayaan. Untuk mengikuti kegiatan seperti ini, beberapa guru BK mengaku mendapatkan dukungan pembiayaan dari sekolah, sementara yang lainnya tidak memperoleh dukungan dari sekolahnya. Guru BK yang tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dari sekolah merasakan kesulitan mengikuti berbagai penguatan kapasitas dari perguruan tinggi atau organisasi profesi, khususnya lagi bila diselenggarakan di luar Sulawesi Selatan.
- c. Kurangnya tenaga guru BK di sekolah juga dirasakan sebagai sumber kendala. Guru BK dari sekolah yang hanya memiliki jumlah guru BK yang terbatas merasa kesulitan mengikuti program penguatan kompetensi, khususnya yang berdurasi waktu beberapa hari. Mereka biasanya sulit mendapatkan ijin mengikuti kegiatan pelatihan karena tidak ada lagi yang akan melayani siswa bila mereka pergi.
- d. Kepala sekolah dan personil sekolah lainnya seringkali mengarahkan guru BK bekerja di luar dari tugas profesi seharusnya. Karena itu, penguatan kompetensi di bidang studi seringkali dinilai sia-sia sebab pada akhirnya kompetensi itu tidak banyak digunakan dalam pelaksanaan sehari-hari. Beberapa guru BK menyatakan keikutsertaan mereka dalam kegiatan pelatihan lebih dimotivasi oleh keinginan bertemu dan bereuni dengan teman kuliah ketimbang hasrat untuk meningkatkan kompetensi.

Bentuk Penguatan Kompetensi yang Dinilai Tepat bagi Guru BK

Dari pelaksanaan wawancara dan *focus group discussion* (FGD) yang telah dilakukan diperoleh pula sejumlah ide, pendapat, dan saran dari para guru BK terkait penyelenggaraan penguatan kapasitas mereka, yaitu

- a. Dari sisi materi, beberapa aspek kompetensi yang dirasakan perlu mendapatkan penguatan, antara lain: (1) Penyusunan instrumen pengumpulan data dalam rangka asesmen kebutuhan siswa, (2) Interpretasi data hasil asesmen ke dalam bentuk program dan kebutuhan layanan untuk siswa, (3) Teknik-teknik konseling sesuai permasalahan yang banyak dialami oleh siswa di sekolah, (4) Kemampuan membangun kerjasama dengan personil sekolah lainnya dalam rangka penuntasan problem siswa, (5) Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut dari program dan layanan yang telah dilakukan, dan (6) Penelitian tindakan bimbingan konseling dan penulisan karya tulis ilmiah.
- b. Dari sisi waktu pelaksanaan penguatan kompetensi, hasil FGD menunjukkan, antara lain: (1) Guru BK umumnya menghendaki agar waktu pelaksanaan pelatihan tidak mengganggu jadwal tugas di sekolah, khususnya bukan di masa-masa sibuk seperti saat penerimaan siswa baru, menjelang ujian dan selama masa ujian semester ataupun ujian nasional, (2) Waktu libur sekolah adalah waktu yang paling tepat, namun seringkali ada kendala dengan persiapan administrasi untuk surat tugas dari kepala sekolah dan ketersediaan dukungan pembiayaan dari sekolah.
- c. Dari sisi tempat pelaksanaan penguatan kompetensi, peserta FGD secara umum menyepakati tempat terbaik untuk penguatan kapasitas guru BK adalah berbasis sekolah. Pelatihan berbasis sekolah tidak banyak mengganggu jadwal kehadiran di sekolah dan bisa segera kaitkan dengan situasi dan problem riil yang dihadapi. Pelatihan di luar sekolah apalagi di luar kabupaten disarankan untuk tidak terlalu sering dilakukan, atau dilakukan dalam durasi waktu yang pendek.
- d. Dari sisi narasumber untuk pelaksanaan penguatan kompetensi, peserta FGD cenderung sepakat bahwa kolaborasi atau paduan antara narasumber dari perguruan tinggi dan fasilitator guru BK

yang telah dilatih adalah opsi terbaik. Narasumber perguruan tinggi dinilai dapat member wawasan luas dan konsep lebih mencerahkan terkait permasalahan yang dialami di lapangan. Sementara fasilitator dari guru BK bisa memberi pemahaman lebih praktis, khususnya dalam pemenuhan tata-administrasi pelayanan di lapangan.

- e. Di samping itu, dalam rangka mengefektifkan pelayanan BK di sekolah, dari hasil FGD antara lain diperoleh informasi:
- 1) Perlunya menyertakan kepala sekolah dan guru dalam berbagai pelatihan tentang bimbingan konseling, atau menyertakan materi tentang bimbingan konseling dalam penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru bidang studi. Dengan demikian, kepala sekolah dan guru bisa memahami lingkup tugas dan pola penanganan yang dilakukan oleh guru BK pada siswa.
 - 2) Kehadiran pengawas pendidikan perlu lebih diefektifkan. Tidak semua pengawas memiliki latar keilmuan dan wasan tentang BK sehingga mereka tidak bisa memberi bantuan dan saran bagi guru BK dalam menyelesaikan tugas profesiol di lapangan. Karena itu, dianggap perlu pengangkatan pengawas berbasis bidang studi BK, atau memberi penguatan kepada para pengawas sekolah tentang bimbingan konseling.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diuraikan pembahasan sebagai berikut:

1. Aspek Kompetensi yang Butuh Penguatan.

Hasil analisis secara umum menunjukkan tingginya indeks kebutuhan guru BK untuk mendapatkan penguatan pada semua butir kompetensi yang tercakup dalam sepuluh kompetensi inti konselor. Sebagian besar butir kompetensi mendapatkan indeks di atas 81 atau masuk kategori sangat tinggi, dan hanya beberapa butir yang memperoleh indeks di bawah 80 namun tetap masuk kategori tinggi.

Hasil analisis ini tampak searah dengan perolehan hasil uji kompetensi guru (UKG) yang rata-rata rendah. Hasil penelitian Pandang, dkk (2016) menunjukkan, skor rerata UKG yang dicapai guru BK SMA di Kota Makassar adalah 57,87, atau hanya. Ini jauh dari standar ketuntasan yang ditargetkan pada tahun 2016 yaitu 70, apalagi standari untuk tahun 2017 yaitu 80.

Dilihat dari analisis aspek, maka yang beberapa aspek kompetensi inti yang menunjukkan indeks tertinggi yaitu kompetensi penelitian (kompetensi inti 10), pelaksanaan asesmen (kompetensi inti 4), perancangan program BK (kompetensi inti 6), penilaian dan evaluasi program BK (kompetensi inti 8), serta penguasaan kerangka teori dan praksis bimbingan konseling (kompetensi inti 5). Semua kompetensi inti tersebut tercakup dalam kompetensi profesional. Tiga kompetensi inti yang tercakup dalam kompetensi pedagogi, yaitu kompetensi 1, 2, dan 3 meskipun juga masuk kategori tinggi namun nilai indeksnya di bawah nilai dari rata-rata perolehan indeks dari kompetensi inti profesional.

Hasil analisis tersebut agak berbeda dengan hasil temuan terkait dengan UKG BK sebelumnya yang menunjukkan rerata skor UKG pedagogi guru BK SMA di Kota Makassar yang lebih rendah dari rerata skor kompetensi profesional mereka. Ini tampaknya dipengaruhi oleh kemendesakan digunakannya butir kompetensi. Lima aspek kompetensi ini yang memperoleh indeks tertinggi semuanya berkaitan langsung dengan kerja sehari-hari guru BK sehingga kebutuhan untuk penguatan pada aspek kompetensi ini dirasakan amat tinggi.

2. Permasalahan dalam mengikuti kegiatan penguatan kompetensi.

Dalam mengikuti kegiatan penguatan kompetensi, ada beberapa permasalahan yang dialami oleh guru BK, yaitu sedikit dan tidak meratanya kesempatan mengikuti penguatan kompetensi, kurang tersedianya dukungan pembiayaan, terbatasnya tenaga guru BK, dan disorintasi tugas yang dilaksanakan oleh guru BK. Kondisi-kondisi ini adalah fakta nyata yang terjadi di lapangan.

Penguatan kapasitas yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah umumnya memprioritaskan pada guru mata pelajaran, khususnya yang masuk dalam mata ujian nasional. Ini menyebabkan anggaran untuk pelatihan guru BK menjadi amat terbatas, sehingga tidak semua guru BK bisa memperoleh kesempatan untuk mengikutinya dengan baik. Demikian pula, dukungan pembiayaan

sekolah pada guru untuk mengikuti pelatihan umumnya juga lebih memprioritaskan pada guru mata pelajaran yang di-UN-kan.

Banyak sekolah tidak bisa memenuhi ratio guru BK dan siswa 1 : 150. Beberapa sekolah bahkan punya guru BK dengan ratio hingga 1 : 500. Wajar bila guru BK dari sekolah seperti ini mengalami kesulitan meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan penguatan kompetensi, khususnya yang dilakukan di luar Makassar atau yang berdurasi waktu beberapa hari.

3. Ide untuk efektivitas penguatan kompetensi

Hasil FGD dan wawancara terkait dengan materi penguatan kompetensi yang dibutuhkan secara umum searah dengan hasil analisis kuantitatif dari inventori kebutuhan. Hasil analisis memberi penjelasan lebih jauh mengenai aspek-aspek keterampilan perlu ditingkatkan oleh guru BK. Dalam pelaksanaan asesmen, guru BK terutama butuh pelatihan dalam penyusunan instrumen dan cara menginterpretasikan datanya ke dalam program. Dalam aspek penguasaan kerangka teori dan praksis bimbingan konseling, guru BK tampaknya butuh penguatan keterampilan dalam teknik konseling yang sesuai dengan permasalahan yang banyak dialami oleh siswa di sekolah. Dalam aspek kompetensi penelitian, guru BK terutama butuh penguatan dalam melakukan penelitian tindakan BK dan menulis karya tulis untuk publikasi. Aspek lain yang memerlukan penguatan yaitu kemampuan menjalin kerjasama dengan para personil sekolah. Ini masuk pada aspek kompetensi sosial yang tidak tercakup dalam 10 kompetensi inti yang diukur dalam UKG.

Dari sisi waktu penyelenggaraan, guru BK lebih menyenangi pelaksanaan penguatan kompetensi pada waktu-waktu yang tidak mengganggu kesibukan tugas di sekolah. Dari sisi waktu tempat kegiatan, guru BK umumnya lebih suka model pelatihan berbasis sekolah. Ide terkait waktu dan tempat pelaksanaan penguatan kompetensi ini juga sekaligus bisa mengatasi kesulitan guru BK dari sekolah yang kekurangan jumlah tenaga guru BK.

Penugasan pengawas berbasis sekolah, yaitu pengangkatan pengawas untuk melayani beberapa sekolah dirasakan oleh guru BK sebagai sumber hambatan. Ini karena banyak pengawas sekolah tidak berlatar pendidikan BK sehingga kurang paham ihwal tugas profesional guru BK. Para pengawas yang tidak berlatar pendidikan BK cenderung hanya mengecek pemenuhan bukti administratif layanan dan tidak bisa memberikan saran perbaikan untuk operasionalisasi kegiatan dalam tugas profesional guru BK

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan, pertama: tingginya indeks kebutuhan guru BK di Kota Makassar untuk mendapatkan penguatan pada semua butir kompetensi yang tercakup dalam sepuluh kompetensi inti konselor. Sebagian besar butir kompetensi mendapatkan indeks kebutuhan yang masuk kategori sangat tinggi, dan hanya beberapa butir yang memperoleh indeks masuk kategori tinggi. Aspek kompetensi inti yang menunjukkan indeks tertinggi untuk mendapatkan penguatan yaitu kompetensi terkait dengan pelaksanaan penelitian, pelaksanaan asesmen kebutuhan, perancangan program BK, penilaian dan evaluasi program BK, serta penguasaan kerangka teori dan praksis bimbingan konseling.

Kedua, beberapa permasalahan yang dialami guru BK di Kota Makassar dalam mengikuti kegiatan penguatan kompetensi, meliputi: sedikit dan tidak meratanya kesempatan mengikuti penguatan kompetensi bagi guru BK, kurang tersedianya dukungan pembiayaan, sulitnya meninggalkan tugas akibat terbatasnya tenaga guru BK, dan rendahnya motivasi ikut pelatihan akibat disorientasi tugas yang dilaksanakan oleh guru BK di sekolah.

Ketiga, dalam rangka penguatan kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keadaan guru BK, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam program penguatan kompetensi bagi guru BK, meliputi: (a) Dari sisi waktu, pelaksanaan penguatan kompetensi dilakukan pada waktu-waktu yang tidak mengganggu kesibukan tugas di sekolah; (b) Dari sisi strategi kegiatan, guru BK umumnya lebih menyukai model pelatihan berbasis sekolah; (c) Dari sisi narasumber, guru BK menilai kombinasi narasumber dari perguruan tinggi dan fasilitator dari guru BK terlatih adalah pilihan yang lebih tepat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Pertama, Semua aspek kompetensi konselor perlu mendapatkan penguatan. Namun demikian, prioritas untuk mendapatkan prioritas dalam penguatan kompetensi bagi guru BK terutama berkaitan dengan kemampuan melaksanakan penelitian, asesmen kebutuhan, merancang dan menilai program dan layanan, serta penguasaan dan keterampilan dalam melaksanakan pendekatan dan teknik bimbingan konseling sesuai masalah siswa di sekolah.

Kedua, dalam rangka penguatan kompetensi bagi guru BK, beberapa hal yang mendesak dilakukan, antara lain: (a) Perlunya lebih diperbanyak dan diintensifkan penyelenggaraan program penguatan kompetensi bagi guru BK; (b) Penyediaan dukungan dana yang memadai bagi guru BK untuk mengikuti berbagai program penguatan kompetensi; (c) perlibatan kepala sekolah dan guru mata pelajaran dalam pelatihan BK dan atau memasukkan materi terkait BK dalam penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru mata pelajaran.

Ketiga, dalam rangka mengefektifkan dan lebih menyesuaikan program penguatan kompetensi dengan keutuhan dan karakteristik guru BK, maka program penguatan kapasitas hendaknya: (a) menyesuaikan dengan kalender kegiatan sekolah dan atau memanfaatkan waktu-waktu libur; (b) menggunakan pendekatan pelatihan berbasis sekolah; dan (c) dengan narasumber yang merupakan kombinasi pakar dari perguruan tinggi dan praktisi dari guru BK yang sudah terlatih.

Daftar Pustaka

- Anbuthasan, A. & Balakrishnan, V., (2013). Teaching competency of teachers in relation to gender, age, and locality. *Internatonal Journal of Teacher Edcaton Research (IJTER)*, Vol. 2 No. 1 January 2013. h. 31-315.
- Bond, L. (1998). Disparate Impact and Teacher Certification. *Journal of Personnel Evaluation in Education* 12:2, 211-220.
- Chang, M., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A., de Ree, J., & Ritchie, S. (2014). *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making. Directions in Development*. Washington, DC: World Bank. doi: 10.1596/978-0-.
- Creamer, M. (2011). Retrieved April 30, 2016, from Technology Utilization in Field of School Counseling: An Action Research Study (Online): http://teach.valdosta.edu/are/Artmascript/vol1no1/creamer_am.pdf.
- Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). *Preparing Teachers for a Changing World: What Teachers should Learn and Be able to Do*. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2016b). *Kebijakan Pembinaan Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2016). Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan. Paparan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada *Rembuk Nasional Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2016*. Tanggal 22 Februari 2016 di Jakarta
- Pedagogik Guru Madrasah Aliyah (MA) di Kudus. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Ivanova, I., & Skara-Mincane, R. (2016). Development of Professional Identity during Teacher's Practice. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 232, 529 – 536.
- Jumail, 2013. Kompetensi profesional dalam perspektif konselor sekolah dan Peranannya terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri Se-Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Konseling*, Vol2.No.1.Februari. 2013.
- Kanto, K. 2015. Pengaruh sertifikasi terhadap motivasi kerja, kepuasan kerja & kinerja guru BK SMAN. *Jurnal EST PPs UNM*. Vol.1 No.2 September. 2015.
- Kementerian Pendidikan Nasional (2010). *Pedoman Pengelolaan Pengemangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- Kusmayarni. 2009. Komitmen terhadap pekerjaan dan kinerja guru pembimbing di kabupaten bantul. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi DIY*. Vol. 1 no. 1. 2009
- Lestari, M., dkk. 2013. Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Konseling dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. *Jurnal IJGC*. No 2(4) 2013.
- Malik, A.A & Kurniawan, K (2015). Tingkat pemahaman konselor tentang kompetensi professional dalam pelayanan bimbingan konseling. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application, Vol. 4 No 2, 2015*; h. 30-36
- Moyer, M., & Yu, K. (2010). *Factors Influencing School Counselors' Perceived Effectiveness. (Online)*. Retrieved Agustus 17, 2017, from <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ978862.pdf>
- Pandang, A., Aryani, F., Bukhori, S. (2015). Profil Hasil Uji Kompetensi Guru Bimbingan Konseling Jenjang SMA di Kota Makassar. *Laporan Penelitian*. Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941
- Saripuddin (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Professional Guru Bidang Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK. *INVOTEC, Volume X, No. 1*, Februari 2014, h. 67-88
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586
- UNESCO (2014). *Education Strategy 2014 - 2021. Paris: the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. (Online). Retrieved February 25, 2018, from <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf>
- Yon, M. (1991). The Relationship Between a Year-long Student Teaching Experience and Student Teachers' Schemata for Classroom Phenomena. *Journal of Personnel Evaluation in Education* 5, 55-56.